

Strategi Penanggulangan Pengemis Anak Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Nama Penulis Pertama¹⁾, Penulis Kedua²⁾,

Meisya Marsella¹⁾, Ginna Febrita²⁾, Elly Niel Waty³⁾

¹⁾Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

*Corresponding author: E-mail: meisyamarsella00@gmail.com¹,

ginnafbrt@gmail.com², nielwaty@gmail.com³

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan

05/12/2024

Direvisi 12/12/2024

Diterima 29/12/2024

Cite: Meisya Marsella, et al, 2024, Strategi Penanggulangan Pengemis Anak..., SAKAAI: Jurnal Sosial, dan Humaniora. Vol. 01, No. 2, 2024. pp. 178-190.

DOI : ...

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi penanggulangan pengemis anak di Kota Pekanbaru, yang merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Latar belakang penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah anak pengemis yang terjebak dalam siklus kemiskinan dan dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data deskriptif melalui wawancara dan observasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi Geoff Mulgan yang menekankan strategi sebagai penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program rehabilitasi, tantangan seperti mindset anak pengemis dan kurangnya fasilitas rehabilitasi masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk kerjasama dengan instansi terkait dan program pelatihan keterampilan bagi orang tua anak pengemis, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan memutus siklus kemiskinan.

Kata Kunci: *Pengemis anak, strategi penanggulangan.*

Abstract

This research examines strategies for dealing with child begging in Pekanbaru City, which is a complex social issue and requires serious attention from various parties. The background to this research focuses on the increasing number of beggar children who are trapped in the cycle of poverty and the negative impact this has on society. The aim of the research is to identify the causal factors, impacts, and strategies implemented by the Social Service in dealing with this problem. The research method used is a qualitative approach by collecting descriptive data through interviews and observations at the Pekanbaru City Social Service. The theory used in this research is Geoff Mulgan's strategy theory which emphasizes strategy as the use of public resources and

power by public institutions to achieve public goals. The results of the research show that although the Social Service has implemented various rehabilitation programs, challenges such as mindset Beggar children and lack of rehabilitation facilities are still obstacles. The conclusions of this research emphasize the need for a more comprehensive and integrated strategy, including collaboration with relevant agencies and skills training programs for parents of beggar children, to create a better environment for children and break the cycle of poverty.

Keywords: *Child beggars, prevention strategies.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau, dengan jumlah Populasi 1.016.366 jiwa pertahun 2023 dan telah mengalami perubahan dan pengembangan yang signifikan. Kota Pekanbaru juga dianggap sebagai kota Mata Pencaharian dimana kota ini menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi ditandai dengan berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana hiburan, dan lain sebagainya yang dapat mendorong individu untuk mengadu nasib di kota ini. Tapi Nyatanya Kota yang dianggap sebagai tempat pertumbuhan Ekonomi ini, belum berhasil untuk menanggulangi masalah sosial. Salah satu persoalan yang muncul jelas adalah kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi seperti masalah Kemiskinan, Gelandangan, dan Pengemis Anak yang masih terlihat di sudut Kota Pekanbaru.

Pengemis merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis yang dilakoni oleh anak usia sekolah masih banyak terlihat di Kota Pekanbaru. Anak-anak yang mengemis di jalanan sangat rentan terhadap Eksploitasi, Kekerasan dan Kehilangan Kesempatan untuk Berkembang secara optimal. Fenomena ini mencerminkan adanya persoalan sosial seperti ketidakadilan Ekonomi, Disfungsi Keluarga dan Kurangnya akses terhadap Pendidikan serta Perlindungan anak.

Pasca dibubarkannya Departemen Sosial Kota Madya Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru segera menggagas dan membentuk instansi urusan pemerintahan bidang sosial yang digabungkan dengan urusan pemakaman yang disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001 dengan nama Dinas Sosial dan Pemakaman. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman.

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 sampai dengan 12 yang menyatakan bahwa urusan bidang sosial sebagai urusan wajib pemerintahan, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar (basic services), maka urusan pemakaman tidak lagi bergabung dengan urusan bidang sosial dan dinas seutuhnya melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan sosial yang dikukuhkan dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Maka Dinas Sosial dan Pemakaman berubah menjadi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru sendiri untuk kepengurusan rehabilitas dan perlindungan anak dibagi menjadi 9 kategori yakni, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan hukum, dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Dan permasalahan ini berfokus pada anak

jalanan/pengemis.

Permasalahan Pengemis Anak ini menjadi tanggung jawab Pemerintahan setempat yakni Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam menanggulangi persoalan pengemis anak. Dinas Sosial itu sendiri adalah Instansi Pemerintah yang Menangani masalah Kesejahteraan Sosial di masyarakat. Dinas ini Berperan dalam Mengelola dan Menyelenggarakan Program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Tujuan Utama Dinas Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat.

Menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pembaharuan dari UU nomor 25 tahun 2002 menyebutkan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat, termasuk anak jalanan". Untuk mengatasi fenomena pengemis anak ini diperlukan Strategi efektif, yang tidak berfokus terhadap penertiban saja tetapi juga mencakup aspek preventif, intervensi serta rehabilitasi.

- a. Menjadi pengemis, pengamen, asongan, dan/atau pengelap mobil pada fasilitas umum.
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan / atau mengelap mobil di fasilitas umum.

Meskipun pemerintah Pekanbaru telah menerapkan kebijakan mengenai penertiban sosial, khususnya terkait gelandangan dan pengemis, hasil yang diharapkan masih jauh dari target yang di inginkan. Hal ini disebabkan kurang optimalnya penerapan Peraturan Daerah tentang ketertiban sosial oleh Pemerintah Kota. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial mengenai Kasus Seksi Rehabilitas & Perlindungan Anak ada sekitar 152,4% atau 762 jiwa dari rata-rata kasus 5 tahun terakhir yakni dari (2019-2023). Terlihat Dari Tahun 2019-2023, Peraturan Daerah tersebut belum berhasil menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru hingga saat ini. Kondisi ini menyebabkan pengemis semakin bebas beroperasi di Jalanan Kota Pekanbaru, Mereka tersebar seolah sudah di rencanakan akan mengemis di daerah atau tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tindak lanjut berupa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga belum efektif karena ketiadaan fasilitas rehabilitasi bagi mereka. Akibatnya, Upaya pembinaan menjadi kurang Efisien dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Noer Effendi, munculnya pengemis dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

- a. Faktor Eksternal
Seperti kegagalan mendapatkan pekerjaan, terpaksa oleh situasi, bencana alam atau konflik serta pengaruh dari orang lain
- b. Faktor Internal
Seperti kurangnya pendidikan, masalah mental atau fisik, cacat tubuh

(Noer Effendi, 2004: 114).

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Strategi Penanggulangan Pengemis Anak Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru” menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini berfokus pada pengamatan kondisi saat ini dan menggambarkan secara rinci objek penelitian berdasarkan data yang ada. Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, yang terletak di jalan Datuk Setia Maharaja No.6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Obyek tersebut dipilih karena sebagai instansi yang terlibat langsung dalam penanggulangan pengemis anak pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka data dikumpulkan merupakan deskriptif data, yaitu: penjelasan dari suatu fenomena (Flick, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk memahami bagaimana pemerintah atau Dinas Sosial menangani masalah tersebut. Data primer ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, dan survei dengan pihak- pihak yang terlibat. Narasumber dari Penelitian ini adalah Fajrina, S.IP Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber bacaan seperti studi literatur baik berupa artikel, sumber dari internet ataupun sumber-sumber lainnya yang terkait dengan Penanggulangan Pengemis Anak Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengevaluasi strategi yg dilakukan oleh dinas sosial terkait penanggulangan pengemis anak di Kota Pekanbaru, digunakan teori Geoff Mulgan yg menjelaskan strategi pemerintahan ada 5 yaitu : purposes (tujuan), environment (lingkungan), direction (pengarahan), action (tindakan), learning (pembelajaran).

1. Tujuan (Purposes)

Strategi penanggulangan pengemis anak oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki landasan yang kuat pada upaya mencapai tujuan utama, yaitu memutus siklus kemiskinan dan memberikan anak- anak akses ke kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, tujuan ini diwujudkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari program rehabilitasi

hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan mengemis sering kali kehilangan hak-hak dasarnya, seperti pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena itu, Dinas Sosial berkomitmen untuk memberikan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, seperti penertiban, tetapi juga berorientasi pada jangka panjang, melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan keluarga.

Pentingnya tujuan ini tercermin dalam berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan keluarga mereka. Anak-anak yang ditemukan di jalanan tidak hanya diarahkan untuk kembali ke sekolah, tetapi juga diberikan akses ke program pendidikan nonformal dan keterampilan vokasional yang sesuai dengan usia mereka. Tujuannya adalah menciptakan peluang bagi anak-anak ini untuk mandiri dan berdaya saing di masa depan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Keluarga yang bergantung pada penghasilan dari mengemis diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif, sehingga mereka tidak lagi memanfaatkan anak-anak sebagai tenaga kerja di jalan.

2. Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas strategi ini. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, kemiskinan struktural yang dialami oleh banyak keluarga di Pekanbaru menjadi penyebab utama mengapa anak-anak terjun ke jalan. Keluarga-keluarga ini sering kali tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak, sehingga mengemis dianggap sebagai solusi termudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam banyak kasus, anak-anak dimanfaatkan oleh orang tua atau pihak lain untuk menarik belas kasihan masyarakat, yang sering kali memberikan uang kepada pengemis di jalan. Lingkungan sosial ini menciptakan situasi yang sulit untuk dipecahkan, terutama ketika kesadaran masyarakat tentang dampak buruk memberi uang kepada pengemis masih rendah.

Kebijakan sosial yang mendukung, seperti penyediaan fasilitas rehabilitasi, rumah singgah, dan akses ke pendidikan, juga masih terbatas. Banyak anak yang seharusnya mendapatkan tempat di rumah singgah atau fasilitas rehabilitasi justru kembali ke jalan karena kurangnya kapasitas dan pendanaan. Hal ini menunjukkan perlunya lingkungan yang lebih mendukung, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas, untuk memastikan anak-anak dapat keluar dari siklus kemiskinan dan eksploitasi.

3. Pengarahan (*Direction*)

Berdasarkan wawancara, Dinas Sosial memberikan pengarah melalui penyusunan program-program yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Pengarahan ini mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi mereka. Kampanye ini juga bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, khususnya dalam hal memberikan bantuan kepada pengemis di jalan. Sebagai gantinya, masyarakat didorong untuk menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi yang memiliki program rehabilitasi dan pemberdayaan yang terstruktur.

Selain itu, pengarahan juga dilakukan terhadap keluarga anak-anak pengemis. Program-program seperti pelatihan keterampilan untuk orang tua dan bimbingan psikologis dirancang untuk membantu keluarga ini mengubah pola pikir mereka dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, keluarga anak-anak pengemis memiliki pandangan bahwa mengemis adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pengarahan yang efektif dari Dinas Sosial tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada keluarga mereka, agar dapat menciptakan perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

4. **Tindakan (*Action*)**

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial mencakup berbagai langkah konkret, mulai dari penertiban anak-anak di jalan hingga rehabilitasi sosial. Berdasarkan wawancara, salah satu tindakan utama yang dilakukan adalah mendirikan rumah singgah sebagai tempat sementara bagi anak-anak yang ditertibkan dari jalanan. Di rumah singgah ini, anak-anak diberikan makanan, tempat tinggal yang aman, serta akses ke program pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun, keterbatasan fasilitas dan anggaran sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan kampanye kesadaran di masyarakat untuk mengurangi kebiasaan memberi uang kepada pengemis dan mengarahkan bantuan ke jalur yang lebih efektif.

5. **Pembelajaran (*Learning*)**

Pembelajaran menjadi aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan strategi ini. Berdasarkan wawancara, Dinas Sosial melakukan evaluasi rutin terhadap program-program yang telah dijalankan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi masalah pengemis anak. Salah satu pembelajaran penting yang diambil adalah perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada anak-anak tetapi juga pada keluarga mereka.

Misalnya, banyak anak yang kembali ke jalan setelah menjalani program rehabilitasi karena kondisi ekonomi keluarga mereka tidak berubah. Oleh karena itu, Dinas Sosial berupaya untuk memperkuat program pemberdayaan keluarga dan memperluas kerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan layanan yang

lebih komprehensif. Pembelajaran ini juga mencakup pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak.

Berdasarkan penelitian langsung terkait permasalahan pengemis anak di Kota Pekanbaru, pengemis anak ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi ketentraman dan ketertiban umum. Dampak yang pertama yang berpotensi terjadi adalah adanya gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan, pusat kota atau taman kota berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. (Sari & Bakar 2020 dalam Idza, 2023: 150) menyatakan bahwa gelandangan dan pengemis dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan warga, dimana warga dapat merasa terancam dan implikasinya kota menjadi tidak aman.

Fenomena tersebut dapat menciptakan adanya ketidaknyamanan bagi warga. Gangguan visual dan sensori karena adanya gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan (seperti trotoar, taman, dan lain sebagainya), dapat terjadi. Gambaran tersebut tidak hanya merefleksikan tentang gambaran social saja tetapi dapat menggambarkan atmosfer yang kurang nyaman. Di sisi lain, adanya persepsi keamanan masyarakat yang dapat terganggu karena adanya gelandangan dan pengemis terutama pada saat bertemu di tempat sepi atau minim pencahayaan. Estetika lingkungan juga menjadi terganggu karena adanya gelandangan dan pengemis yang biasanya duduk di trotoar. Apabila dinilai lebih jauh, hal tersebut dapat berimplikasi pada daya tarik kota.

Dampak kedua yang berpotensi terjadi adalah adanya stigmatisasi dan diskriminasi. Upaya yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengusiran secara paksa bagi gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan (Naim, 2022; Syahputra & Saputra, 2020 dalam Idza, 2023: 151). Tindakan pengusiran tersebut dapat memicu stigmatisasi dan diskriminasi terutama bagi gelandangan dan pengemis.

Meskipun tindakan pengusiran dianggap sebagai solusi, tetapi solusi tersebut bukan merupakan solusi yang holistik karena tidak menangani akar permasalahan secara langsung. Tindakan pengusiran tersebut dapat memunculkan potensi persepsi masyarakat atau warga kota menjadi negatif kepada gelandangan dan pengemis. Masyarakat dapat menganggap bahwa gelandangan dan pengemis merupakan sekelompok orang yang tidak memberi kontribusi nyata untuk masyarakat. Munculnya stereotip tersebut dapat berimplikasi pada munculnya stigma sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Stigma sosial tersebut dapat berdampak pada terhambatnya upaya gelandangan dan pengemis untuk dapat menyatu Kembali ke dalam masyarakat.

Dampak ketiga yang berpotensi terjadi adalah adanya siklus kemiskinan. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang disebabkan oleh faktor ekonomi menunjukkan adanya siklus kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga gelandangan

dan pengemis tersebut. Gelandangan dan pengemis meningkat akibat buruknya kondisi sosial ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kurangnya keterampilan kerja, pendidikan rendah, lingkungan, aspek sosial budaya, dan kesehatan.

Gelandangan dan pengemis pada umumnya memiliki keterbatasan akses pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya aspek pendidikan, sementara itu aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong adanya peningkatan pendapatan lebih baik di dalam suatu keluarga. Masharyono, (2012) menyebutkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara pendidikan dan penghasilan, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan. Secara sederhana, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, apabila gelandangan dan pengemis mengalami keterbatasan akses pendidikan maka akan kesulitan dalam memperoleh keterampilan yang dibutuhkan agar bisa bekerja secara layak.

Ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil tersebut berimplikasi pada terwujudnya ketergantungan gelandangan dan pengemis pada pekerjaan informal seperti yang telah dilakukan tersebut. Mengemis dan menjadi gelandangan seringkali menjadi pilihan terakhir sebagai respons terhadap keterbatasan dalam ruang gerak ekonomi. Profesi informal ini dipilih untuk bertahan hidup, mengakibatkan perubahan sikap mental menjadi seorang pengemis. Sebagaimana diketahui, pendapatan yang diperoleh dari hasil mengemis dan menjadi gelandangan pun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehingga siklus kemiskinan semakin nyata dihadapi oleh gelandangan dan kemiskinan. Gelandangan dan kemiskinan terjebak pada situasi dan kondisi tersebut, karena ketidakberdayaan yang dimiliki sebagai seorang manusia. Dalam penanggulangan pengemis anak di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang berasal dari dua sisi, yaitu dari pihak Dinas Sosial sendiri dan dari anak-anak pengemis itu sendiri.

Dari Pihak Dinas Sosial:

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial sering kali menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan program-program rehabilitasi dan pemberdayaan anak-anak pengemis. Keterbatasan ini dapat mencakup fasilitas tempat tinggal, pusat rehabilitasi, serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, program yang dirancang untuk membantu anak-anak ini mungkin tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

a). Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk program penanggulangan pengemis anak sering kali tidak mencukupi. Tanpa dukungan dana yang memadai, Dinas

Sosial kesulitan dalam mengembangkan dan melaksanakan program yang komprehensif, mulai dari pendidikan hingga pelatihan keterampilan. Hal ini menghambat upaya Dinas Sosial dalam memberikan layanan yang optimal bagi anak-anak yang membutuhkan.

b). Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Dinas Sosial harus memiliki pemahaman dan keahlian yang tepat untuk menangani masalah sosial yang kompleks ini. Kendala dalam hal pelatihan dan pendidikan untuk petugas sosial dapat mengurangi efektivitas program. Dinas Sosial juga perlu bekerja sama dengan lembaga lain seperti Satpol PP dan Kementerian Sosial untuk memastikan adanya sinergi dalam penanganan masalah ini, namun kadang koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan tersendiri.

Dari Pihak Anak Pengemis:

c). Penggalan Informasi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Dinas Sosial adalah dalam penggalan informasi terkait latar belakang anak-anak pengemis. Banyak dari mereka yang berbohong tentang asal-usul, orang tua, dan kondisi kehidupan mereka. Hal ini menyulitkan Dinas Sosial untuk memahami secara mendalam permasalahan yang mereka hadapi dan untuk merancang intervensi yang tepat. Informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada keputusan yang tidak efektif dalam program rehabilitasi.

Mindset dan Kebiasaan Mengemis Banyak anak pengemis yang memiliki mindset bahwa mengemis adalah cara termudah untuk mendapatkan uang. Mereka merasa bahwa penghasilan dari mengemis lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain, sehingga enggan untuk beralih ke kegiatan yang lebih konstruktif. Mindset ini menjadi hambatan besar bagi Dinas Sosial untuk mengubah perilaku dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi mereka.

d). Rantai Kemiskinan Keluarga

Anak-anak pengemis sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika mereka melihat orang tua, kakek, atau nenek mereka mengemis, mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain dan merasa bahwa mengemis adalah norma yang diterima dalam keluarga mereka. Mencoba memutus rantai ini adalah tantangan besar, karena memerlukan perubahan dalam pandangan keluarga secara keseluruhan mengenai cara hidup diri dan keluarga.

Peran Masyarakat terkait upaya mendukung kasus penanggulangan pengemis anak di Kota Pekanbaru Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak jalanan dan pengemis. Masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan tes kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan seksual bagi anak perempuan di jalanan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mencegah masalah

kesehatan, tetapi juga memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

1). Sosialisasi dan Kerja Sama dengan Dinas Sosial

Masyarakat dapat berperan aktif dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Melalui kolaborasi dengan universitas, seperti STIKES, berbagai kegiatan sosialisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan pengemisahan. Kegiatan ini dapat mencakup pengumpulan data tentang anak-anak pengemis dan pengemis jalanan, di mana masyarakat berperan sebagai pengumpul informasi dan penghubung antara Dinas Sosial dan anak-anak yang membutuhkan perhatian.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak jalanan dan pengemis. Masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan tes kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan seksual bagi anak perempuan di jalanan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya membantu dalam mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan, tetapi juga memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

2). Mengurangi Pemberian Uang kepada Pengemis

Masyarakat diharapkan untuk tidak memberikan uang langsung kepada pengemis, terutama kepada anak-anak. Pemberian uang tunai hanya akan memperkuat kebiasaan mengemis dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sebagai alternatif, masyarakat bisa diarahkan untuk memberikan sumbangan melalui lembaga-lembaga resmi seperti Baznas, Infas, atau Sudakos, yang memiliki program-program yang lebih terstruktur untuk membantu anak-anak dan pengemis.

Dinas Sosial bersama masyarakat perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan bantuan melalui jalur yang benar. Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam memberi bantuan, sehingga lebih berfokus pada solusi jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara yang tidak menyelesaikan masalah.

3). Penyediaan Fasilitas dan Dukungan Peran masyarakat

Hal ini juga dapat terlihat dalam penyediaan fasilitas yang mendukung anak-anak jalanan. Pihak swasta dan individu diharapkan dapat berkontribusi dengan menyediakan panti asuhan atau tempat penampungan bagi anak-anak pengemis. Keterlibatan sektor swasta dalam memberikan dukungan berupa pendanaan, tempat tinggal, pendidikan, dan pelatihan keterampilan akan sangat membantu dalam memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk keluar dari siklus pengemisahan.

Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat juga dapat dilakukan untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap anak-anak pengemis.

Kampanye, seminar, atau kegiatan komunitas yang bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang pengemisahan dan solusi yang ada dapat membantu memobilisasi masyarakat untuk berkontribusi secara positif.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani pengemis anak telah dilakukan melalui berbagai upaya seperti program rehabilitasi, pemberdayaan keluarga, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, implementasi strategi ini belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi jumlah pengemis anak secara signifikan dan memutus siklus kemiskinan mereka. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengemis anak di beberapa lokasi strategis di kota, serta tingkat keberlanjutan program yang terbatas.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan strategi pengemis anak, diantaranya: Keterbatasan dalam sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia untuk program penanggulangan pengemis anak seringkali tidak mencukupi, Sumber daya manusia di Dinas Sosial harus memiliki pemahaman dan keahlian yang tepat, Mindset dan Kebiasaan Mengemis dari pengemis, Penggalan Informasi dari para pengemis anak, Rantai Kemiskinan Keluarga yang tidak berubah-ubah. Untuk itu diperlukan peran dari masyarakat terkait upaya – upaya yang dilakukan untuk menangani masalah pengemis anak di kota pekanbaru seperti sosialisasi dan kerja sama dengan dinas sosial, mengurangi pemberian uang kepada pengemis, penyediaan fasilitas dan dukungan. Dengan upaya ini diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, pengemis anak di Kota Pekanbaru dapat berkurang secara signifikan dan masalah sosial ini dapat teratasi secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

- Debby Intan Suci Rahmawati, Eka Yulyana. "Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang," 2 Oktober 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7134027>.
- Idza, Allisa Akhidatul. "GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM." *Jurnal Tatapamong*, 23 Desember 2023, 145–61.
- Muslim, Muslim. "PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA PEKANBARU." *Jurnal EL- RIYASAH* 4, no. 1 (23 Desember 2013):24.

<https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26>. "PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBAR NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT," t.t.

Rachman, Dian Tannia. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya," 2023.

Sari, Devita Yulia, dan Achmad Ashar Bakar. "EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGA DAN PENGEMIS DI KABUPATEN

TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (25

April 2020).<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>. "Strategi Tokoh Lokal melalui Komunitas_S," t.t.

Syahrudin, Syahrudin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, dan Rifdan Rifdan. "STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (23 November 2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2582>.

Waleleng, Grace J., dan Maria Pratiknjo. "Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado." *AGRI-SOSIOEKONOMI* 19, no. 1 (28 Januari 2023). <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i1.46924>.

Wijayanti, Diah Puspita, dan Eny Kusdarini. "Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten," t.t.

Zefianningsih, Betha Dwidinanti, Budhi Wibhawa, dan Hadiyanto A. Rachim. "PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH PANTI SOSIAL BINA KARYA „PANGUDI LUHUR“ BEKASI." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (1 Januari 2016). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13600>.